



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MARHAEN DJUMADI
2. Jabatan : WAKIL BUPATI
3. NHK : 401037

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 3.039.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/280 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/160 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah Seluas 1524 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/120 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, WARISAN Rp. 250.000.000
5. Tanah Seluas 196 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 42.000.000
6. Tanah Seluas 196 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 42.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 163 m2/40 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 500 m2/350 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , LAINNYA Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 407.750.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.4 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV 2.0 A/T Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000



3. MOTOR, HONDA VARIO TECHNO Tahun 2011, HASIL SENDIRI
Rp. 5.750.000
4. MOTOR, HONDA ADV 150 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
32.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 131.080.150

D. SURAT BERHARGA Rp. 101.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.190.529.283

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.869.359.433

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.869.359.433

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.